



Strategi Pengelolaan Anggaran Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat

Syahdan Ujung¹, Dewi Sartika², Cut Widy Aulia Putri³, Cut Sri Firman Hastuti⁴, Said Mahdani⁵

Universitas Teuku Umar, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: syahdanujung@gmail.com, dewisartika@utu.ac.id,

cutwidyauliaputri@utu.ac.id, cutsrifirman@utu.ac.id, saidmahdani@utu.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the Education Budget Management Strategy to Improve the Quality of Education and Culture in West Aceh Regency. Education is the largest sector, absorbing 20% of the State Budget (APBN). This is based on the mandate of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The research problem formulation is: How is the Budget Managed, What are the Management Efficiency Strategies, and What are the Obstacles to Improving Education Quality? This study uses Agency Theory. This research utilizes empirical (field) facts. This research was conducted over a period of four months: one month for data collection and three months for data processing. The research object was the West Aceh Regency Education and Culture Office. The data sources used primary data. Data collection included interviews, documentation, and observation. The informant selection was conducted using a purposive sampling technique. The research concludes that: The stages of education budget preparation are sufficiently accountable and transparent, and in accordance with standard operating procedure (SOP). The education budget management strategy in preparing each sector prioritizes work programs to achieve educational quality. The challenges encountered include some students skipping school to mine for gold, and teachers' welfare is poor.

Keywords: Strategy, Management, Budget, Education, Quality Improvement, West Aceh.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Pengelolaan Anggaran Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Pendidikan merupakan sektor terbesar yang banyak menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20%. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rumusan masalah peneliti Bagaimana Pengelolaan Anggaran, Bagaimana Strategi Efisiensi Pengelolaan dan Bagaimana Kendala Untuk meningkatkan Mutu Pendidikan. Penelitian ini menggunakan Teori Agensi Penelitian ini menggunakan fakta empirik (lapangan). Penelitian ini dilakukan dalam kurung waktu 4 bulan, 1 bulan pengumpulan data 3 bulan pengolahan data. Objek penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Sumber data menggunakan data Primer. Pengumpulan data Wawancara, Dokumentasi, dan observasi. Penentuan informan ini dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Tahapan-tahapan penyusunan Anggaran Pendidikan sudah cukup

akuntabilitas dan transparan dan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP), Strategi Pengelolaan Anggaran Pendidikan dalam penyusunan anggaran Pendidikan setiap bidang akan memprioritaskan program kerja dalam mewujudkan Mutu Pendidikan dan kendala yang ada di lapangan ada beberapa siswa rela bolos sekolah untuk menambang emas dan tingkat kesejahteraan gurukurang baik.

Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan, Anggaran, Pendidikan, Peningkatan Mutu, Aceh Barat.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang disepakati dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa dan negara (Azri et al., 2024). Sebagai tonggak peradaban suatu negara, pendidikan menjadi sebuah pondasi paling penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan mampu berdaya saing (Wahono, 2021). Dengan kata lain, kemajuan suatu negara dapat dilihat dari bagaimana sistem pendidikan di negara tersebut. Sebaliknya, buruknya sistem pendidikan akan membuat negara tersebut mengalami ketertinggalan (Banjarnahor, 2023).

Di Indonesia sendiri, pendidikan merupakan sektor terbesar yang banyak menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20%. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun alokasi anggaran pendidikan tersebut terbilang cukup besar, namun realitas yang ada menunjukkan bahwa strategi dalam pendistribusian dana pendidikan masih menjadi kendala cukup serius yang berdampak pada mutu pendidikan (Fadhli, 2017). Alokasi anggaran yang signifikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sektor pendidikan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain adalah ketidaktepatan sasaran alokasi dana, ketimpangan distribusi anggaran antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta rendahnya kapasitas manajerial dalam mengelola anggaran secara efektif.

Munurut Tilaar, Mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan dalam meningkatkan daya saing peserta didik melalui peningkatan kualitas pembelajaran, tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan (Tilaar, 2002). Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, Mutu pendidikan adalah upaya terus-menerus untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan pendidikan, baik itu siswa, orang tua, masyarakat, maupun pemangku kepentingan (Hidayah 2022). Oleh karena itu, mutu pendidikan dapat diartikan sebagai upaya sistem pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui kualitas pendidikan, tenaga pendidik, dan sarana-prasarana yang memadai dengan tujuan terciptanya sumber daya manusia yang mempunyai daya saing (Komariyah et al., 2022).

Namun pada faktanya, mutu pendidikan di Indonesia mengalami kendala serius yang harus segera diatasi, salah satunya adalah rendahnya mutu pendidikan (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), (Qasanah 2023). Meskipun pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, kualitas pendidikan nasional masih belum optimal. Rendahnya

mutu pendidikan dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti rendahnya hasil belajar siswa, keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten, serta kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran (Kemendikbudristek, 2021). Data Programme for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga menunjukkan bahwa capaian literasi, numerasi, dan sains siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional. Kondisi ini menandakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menciptakan ekosistem pembelajaran yang efektif dan berkualitas (Sari & Asmendri, 2020).

Selain itu, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya mutu pendidikan. Banyak daerah terpencil masih mengalami kekurangan guru, terutama dalam mata pelajaran sains dan matematika, sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran (Puspita & Andriani, 2021). Di sisi lain, tenaga pendidik yang ada pun belum sepenuhnya mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengadaptasi metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman (Tsofiawati, et al., 2025). Tak hanya itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah-daerah pelosok, semakin memperburuk kondisi mutu pendidikan. Masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas layak, laboratorium, perpustakaan, serta akses terhadap teknologi digital yang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembelajaran di era modern. Kurangnya fasilitas ini menyebabkan keterbatasan pengalaman belajar siswa dan berimplikasi pada rendahnya kualitas pendidikan secara keseluruhan (Azri & Raniyah, 2024).

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah kurangnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan (Suryadi, 2019). Hal ini menyebabkan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah. Salah satu permasalahan utama adalah masih ditemukannya berbagai kasus penyalahgunaan dana pendidikan, di mana alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran menyebabkan banyak sekolah mengalami keterbatasan dalam pengadaan fasilitas belajar. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal akibat lemahnya pengawasan dan sistem akuntabilitas yang kurang transparan. Kasus-kasus seperti mark-up anggaran, program fiktif, dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah menjadi hambatan serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah (Mulyana & Amalia, 2024).

Simpulan yang dapat ditarik dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan adalah bahwa strategi pengelolaan anggaran pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, khususnya dalam memastikan efektivitas dan efisiensinya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Seperti yang dikemukakan oleh Jamilah (2023), pengelolaan administrasi pembiayaan pendidikan di tingkat sekolah masih belum optimal akibat kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan

Sekolah serta laporan pertanggungjawaban. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang belum menyeluruh semakin memperburuk efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam konteks pengelolaan anggaran pendidikan untuk peningkatan mutu, teori agensi memandang pemerintah atau masyarakat sebagai principal yang memberikan mandat pengelolaan dana publik, sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan sebagai agen yang melaksanakan pengelolaan tersebut. Hubungan ini menuntut agar agen bertindak sesuai kepentingan principal dengan menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Namun, ketidakseimbangan informasi dan potensi penyimpangan kepentingan dapat menimbulkan risiko agensial, sehingga diperlukan mekanisme kontrol dan evaluasi yang efektif guna memastikan tujuan utama peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai (Andi Yusrifal, 2018).

Satuan pendidikan berkaitan erat dengan pengelolaan anggaran pendidikan yang transparansi dan akuntabel. Anggaran pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Anggaran pendidikan yang memadai memungkinkan penyediaan fasilitas belajar yang layak, peningkatan kompetensi pendidik, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman (Sartini, et al., 2024). Di Provinsi Aceh, terdapat beberapa sumber anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan.

Diketahui bahwa terdapat empat sumber utama, yaitu tambahan dana bagi hasil (TDBH) Migas untuk pendanaan pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pendanaan pendidikan di kedua tingkatan tersebut. Persentase alokasi anggaran pendidikan bervariasi, dengan TDBH Migas dialokasikan sebesar 30% hingga 40% dari total dana yang diterima, sedangkan Dana Otsus menetapkan alokasi sebesar 60% baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Dasar hukum yang mendasari sumber-sumber pendanaan ini meliputi beberapa peraturan, seperti Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta sejumlah Qanun Aceh yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan dana otonomi khusus. Regulasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan melalui alokasi dana yang jelas dan terarah. Tabel ini menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal di Aceh dirancang untuk memastikan pendidikan memperoleh porsi anggaran yang signifikan, guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Provinsi Aceh menduduki peringkat ke-9 dalam jumlah siswa yang diterima pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2023, dengan tingkat kelulusan sebesar 41%. Dari sisi jumlah peserta, Aceh hanya memiliki 16.550 peserta, yang jauh lebih sedikit dibandingkan provinsi lain seperti Sulawesi Selatan (33.212 peserta), Jawa Timur (112.421 peserta), dan Sumatera Utara (55.638 peserta). Meskipun persentase kelulusan tinggi, jumlah siswa Aceh yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri masih tergolong rendah secara absolut jika dibandingkan dengan provinsi lain (Dinas Pendidikan Aceh, 2023).

Diketahui bahwa 10 provinsi dengan kelulusan SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) tertinggi terdapat dari provinsi Jawa Timur sejumlah pendaftar 112.421 siswa dan diterima di perguruan tinggi 35.862 siswa. Sedangkan

Provinsi peringkat 10 ialah Banten, dengan jumlah pendaftar 30.882 siswa dan diterima 6.404 siswa di perguruan tinggi. Adapun provinsi Aceh, berada pada peringkat 9. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di provinsi Aceh masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya. Angka partisipasi mencapai 16.550 siswa, namun yang berhasil lolos dalam SNBT hanya mencapai 6.734 siswa.

Kemudian, data ini menyoroti partisipasi siswa di Sekolah Menengah Atas di Provinsi Aceh berdasarkan Kabupaten/Kota. Berdasarkan kelompok Usia 16-18 tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebesar 80,63%, jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya APS Kabupaten Aceh Barat tergolong 5 terendah dalam APS jika dibandingkan dengan semua daerah yang ada di Aceh. Sedangkan Menurut Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan, tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Aceh Barat hanya mencapai 60,61%, ini merupakan presentasi terendah di semua kabupaten di provinsi Aceh Pada Tahun 2023 (BPS Aceh, 2023).

Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) mengindikasikan bahwa masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengakses pendidikan secara optimal, baik karena faktor ekonomi, keterbatasan infrastruktur, maupun kurangnya dukungan akademik. Selain itu, meskipun tingkat kelulusan SNBT di Aceh cukup tinggi, jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri masih rendah jika dibandingkan provinsi lainnya, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam kesiapan akademik siswa.

Masalah ini mencerminkan perlunya perencanaan dan implementasi strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Alokasi dana yang ada perlu lebih difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, seperti penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penguatan infrastruktur pendidikan, termasuk fasilitas sekolah dan teknologi pembelajaran. Selain itu, mekanisme evaluasi penggunaan anggaran harus diperkuat agar setiap dana yang dialokasikan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan strategi yang lebih terarah, diharapkan pengelolaan anggaran pendidikan dapat menjadi instrumen utama dalam mengatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan daya saing siswa di Kabupaten Aceh Barat.

Efisiensi dan pemangkasan anggaran berdampak pada terhambatnya program-program peningkatan mutu, seperti pendidikan profesi guru dan akreditasi sekolah. Selain itu, rendahnya standar pendidikan dan capaian siswa Indonesia di tingkat internasional masih menjadi tantangan utama. Pemangkasan anggaran juga berdampak pada perekrutan dan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Banyak guru honorer yang tidak mendapatkan insentif atau bahkan diberhentikan karena keterbatasan anggaran, sehingga distribusi dan kualitas tenaga pendidik menjadi tidak optimal. Laporan dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) menunjukkan masih banyak kabupaten/kota yang kekurangan daya tampung sekolah, terutama di tingkat SMP/MTs, serta kebutuhan akan sekolah negeri baru di ratusan daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah (BBC, 2025).

Penelitian terkait pengelolaan anggaran pendidikan telah banyak dilakukan dan menyoroti berbagai aspek penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Studi terdahulu menyoroti bahwa pengelolaan keuangan yang efektif memerlukan tahapan strategis, seperti rapat tahunan, perumusan program, penyusunan anggaran, hingga evaluasi (Siswanto & Fatimah, 2024). Selain itu, penelitian lainnya juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi alokasi sumber daya, seperti keterbatasan dana, masalah transparansi, dan kendala kapasitas pengelolaan keuangan (Nurhidayah & Dewi, 2024). Lebih lanjut, keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan program pendidikan, serta pengawasan oleh otoritas pendidikan dianggap berperan penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan sekolah (Banjarnahor et al., 2023). Transparansi dan akuntabilitas juga diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien dan berdampak pada mutu pendidikan yang lebih baik (Fathony, 2017).

Meskipun demikian, penelitian yang telah dilakukan masih berfokus pada tataran sekolah atau lingkup internal satuan pendidikan. Kajian mengenai strategi pengelolaan anggaran di tingkat lembaga pendidikan yang lebih luas, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, masih sangat terbatas. Padahal, lembaga ini memiliki peran sentral dalam menentukan kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan memastikan distribusi sumber daya yang merata untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan secara makro. Selain itu, kajian yang menyoroti bagaimana anggaran pendidikan dapat secara spesifik diarahkan untuk mendukung kebutuhan operasional, kesejahteraan staf, proses pembelajaran, dan pemeliharaan infrastruktur di tingkat kabupaten masih minim (Komariyah et al., 2022).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi strategi pengelolaan anggaran pendidikan yang diterapkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini berupaya untuk memahami secara khusus bagaimana strategi pengelolaan anggaran pendidikan diterapkan serta sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan mengidentifikasi kendala yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran guna meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, kiranyatempat penulis melakukan penelitian dengan judul "Strategi Pengelolaan Anggaran Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat

METODE

Penelitian ini berdasarkan fakta empirik, yang sering disebut sebagai jenis penelitian lapangan. Berdasarkan fakta dan kenyataan, penelitian lapangan bertujuan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Zakirah, et al., (2020) menyatakan bahwa tujuan dari penelitian jenis ini adalah untuk mempelajari secara menyeluruh latar belakang kondisi saat ini serta interaksi antara individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat sosial. Secara sederhana, Sari &

Asmendri (2020) mengatakan bahwa penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data lapangan. Penelitian lapangan mencakup banyak disiplin ilmu yang sangat kompleks (Mesiono & Haidir, 2020). Selain itu, tergantung pada masalah yang dibahas dan tujuan yang ingin dicapai, penelitian lapangan melibatkan berbagai pihak, seperti organisasi, masyarakat, pemerintah, swasta, atau individu. Penelitian untuk memahami secara mendalam dan detail mengenai strategi pengelolaan anggaran pendidikan dalam peningkatan mutu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Metode yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena secara komprehensif berdasarkan perspektif para pemangku kepentingan, termasuk pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah, tenaga pendidik, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pengelolaan anggaran pendidikan. Adapun objek penelitian yang akan diteliti adalah Strategi Pengelolaan Anggaran Pendidikan dalam Peningkatan Mutu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Lebih khusus penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara mendalam; (a) Pengelolaan anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat; (b) Strategi efisiensi pengelolaan anggaran dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat; dan (c) Kendala yang di hadapi dalam peningkatan mutu pendidikan di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat.

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Berlokasi di Jalan Lapang, Meulaboh, Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Penulis akan melakukan penelitian di lokasi tersebut. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 3 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada peneliti sebagai pengumpul data melalui teknik langsung atau wawancara informan. Informan atau partisipan dalam penelitian ini adalah pejabat yang bertugas dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Untuk mencapai tujuan penelitian, pengumpulan data merupakan bagian penting dari proses penelitian. Jika peneliti tidak mengetahui cara mengumpulkan data, mereka tidak akan mendapatkan data yang diinginkan jika tidak mengetahui metode pengumpulan data. Metode penelitian dapat dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini, dilakukan proses pengujian keabsahan data yang meliputi keakuratan dan menjaga kredibilitas hasil temuan yang telah diperoleh serta interpretasi yang dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan teknik triangulasi dan member checking. Teknik triangulasi digunakan untuk memperkuat keabsahan data dengan membandingkan temuan yang diperoleh dari berbagai sumber data atau pendekatan yang berbeda. Dengan cara ini, keakuratan temuan dapat diuji dan kredibilitas penelitian dapat

ditingkatkan. Dalam penelitian ini, kredibilitas data dikuatkan dengan tipe data yang berbeda yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini trigulasi dilakukan dengan cara membandingkan antara data wawancara, observasi dan dokumentasi dari semua subjek yang diperoleh dari lokasi penelitian (Asrulla et al., 2023). Analisis data merupakan tahapan akhir yang membutuhkan keseriusan, kejelian, dan kehati-hatian seorang peneliti. Apalagi, selama di lapangan, data yang dikumpulkan tentu sangat banyak. Meskipun, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis harus berlangsung secara serempak (*simultaneously*). Oleh karena itu, sebenarnya analisis data telah dimulai sejak proses penelitian berlangsung, di mana peneliti harus cerdas, kreatif dan peka memilih dan memilah data mana yang penting atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Hasil Penelitian ini di dapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 3 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Seluruh informan adalah pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan dan cabang dinas pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

Anggaran Pendidikan

Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran untuk tujuan pendidikan yang di alokasikan oleh kementirian negara atau lembaga, transfer ke daerah, atau pembiayaan termasuk gaji guru. Anggran pendidikan yang di alokasikan melalui belanja pemerintah pusat juga dapat di definisikan sebagai alokasi anggaran untuk tujuan pendidikan yang di alokasikan melalui pemerintah pusat (Fathony & Prianty, 2019). Untuk mengetahui Anggaran Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, berikut ini adalah contoh pertanyaan yang mewakili setiap indikator yang di ajukan kepada Ibu Flora selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat selaku informan dalam penelitian ini :

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Flora selaku Bendahara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

"Menegenai alur perencanaan anggaran itu ada beberapa tahap yang pertama mengidentifikasi kebutuhan dinas, yang kedua penetapan prioritas kebutuhan yang ketiga konsultasi dan partisipasi selanjutnya penyusunan anggaran yang di butuhkan trus alokasi anggaran yang sudah di pagukan dan terakhir pelaksanaan dan pengawasan." (Wawancara 24 Juni 2025).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan perencanaan Anggaran pendidikan ada berbagai tahap sebagai berikut : Alur perencanaan anggaran dilakukan melalui serangkaian tahap sistematis untuk memastikan anggaran yang disusun tepat sasaran, efektivitas, dan akuntabel dilakukan dengan: 1). Mengidentifikasi Kebutuhan, 2). Penetapan Prioritas, 3). Konsultasi dan Partisipasi, 4). Penyusunan Anggaran, 5). Alokasi Anggaran, 6). Pelaksanaan dan Pengawasan.

Sumber Dana Sektor Pendidikan

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Flora selaku Bendahara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut:

"Sumber dana pendidikan ada Dana Alokasi Khusus (DAK) ada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana otonomi Khusus Aceh (Doka) Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas) Pendapatan Hasil Asli Daerah (PAD)" (Wawancara 24 Juni 2025).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sumber Dana sektor pendidikan ada beberapa dana antara lain sebagai berikut : 1). Dana Alokasi Khusus (DAK), 2). Dana Alokasi Umum (DAU), 3). Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), 4). Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas), 5). Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penyerapan Anggaran Pendidikan

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Flora selaku Bendahara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

"kalau saya baca setiap bidang yang mereka anggarkan untuk pengangkatan Mutu Gurunya, seperti mereka buat pelatihan-pelatihan ada juga untuk murid juga ada seperti lomba-lomba cerdas cermat ada lomba musabaqah tilawatil qur'an (MTQ)" (Wawancara 24 Juni 2025).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Prioritas Utama dalam Alokasi Anggaran Pendidikan antara lain sebagai berikut Berdasarkan uraian di atas peneliti deskripsikan setiap bidang yang mereka anggarkan pada sektor pendidikan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga diarahkan untuk peningkatan mutu guru dan siswa. Pada sisi guru, anggaran digunakan untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan, workshop, bimbingan teknis, serta kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. Tujuannya adalah agar para guru memiliki kemampuan yang lebih baik, metode mengajar yang lebih inovatif, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kurikulum dan teknologi pendidikan.

Kepemimpinan yang Kuat dan Tujuan Jelas

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Flora selaku Bendahara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

"eee itu Kepala Dinas, ada BAPEDDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Kepala Daerah, DPRK membidangi Pendidikan, Satuan Pendidikan seperti Kepala Sekolah Tokoh Masyarakat" (Wawancara 24 Juni 2025).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa beberapa Stakeholder Keterlibatan Pengambilan Keputusan Anggaran Pendidikan antara lain sebagai berikut : 1). Pemerintah Daerah, 2). DPRK, 3). Satuan Pendidikan/Sekolah, 4). Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lain, 5).

Monitoring dan Evaluasi

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Flora selaku Bendahara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

"Berbicara mengenai monitoring tentu PA (kepada dinas) yang bertanggung jawab untuk monitoring dan evaluasi, capaian kinerja kita nih dan untuk PEMKAB (Pemerintah Kabupaten) Aceh Barat sendiri itu kita selalu ada rapat setiap triwulan (Tiga Bulan) yang di panggil oleh bapak bupati untuk melihat capaian realisasi penganggaran yang kita usulkan" (Wawancara 24 Juni 2025).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat Mendeskripsikan bahwa Sistem Monitoring dan Evaluasi penggunaan Anggaran Pendidikan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen atau Penanggung Jawab Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan memiliki peran utama untuk melakukan pemantauan serta menilai capaian kinerja yang telah direncanakan. Proses monitoring ini dilakukan secara rutin dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dibiayai dari anggaran benar-benar berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil nyata. Di tingkat Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Aceh Barat, kegiatan evaluasi tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan setiap triwulan atau setiap tiga bulan sekali. Pada rapat ini, Bupati memanggil seluruh dinas terkait, termasuk Dinas Pendidikan, untuk mempresentasikan dan melihat secara langsung capaian realisasi penganggaran yang telah diusulkan sebelumnya. Melalui mekanisme ini, kinerja penggunaan anggaran dapat dievaluasi secara kolektif, permasalahan dapat diidentifikasi lebih cepat, dan langkah perbaikan dapat segera dirumuskan demi tercapainya target pembangunan pendidikan daerah.

Strategi Pengelolaan Anggaran Pendidikan

Pengelolaan Anggaran adalah Perencanaan, pembukuuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas keuangan sekolah semuanya termasuk dalam kategori pengelolaan anggaran. Untuk memastikan bahwa semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi, kepala sekolah dan bendaharawan sekolah bertanggung jawab untuk mengelola anggaran sekolah dengan baik. Kepala sekolah dan bendaharawan bertanggung jawab untuk mengelola anggaran sekolah dengan sebaik mungkin. Ini memastikan bahwa semua komponen sekolah dapat terpenuhi dan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan baik (Qasanah,U.,K.,2023).

Untuk mengetahui strategi pengelolaan anggaran pendidikan, berikut adalah contoh pertanyaan yang mewakili setiap indikator yang di ajukan kepada Ibu Dara Amelia selaku Bidang Pembinaan dan Ketenagaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut:

Kompetensi Sumber Daya Pelaksanaan Anggaran Pendidikan

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dara Amelia selaku Bidang Pembinaan dan Ketenagaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

"Strategi efisiensi, yang pasti kami, khusus kami, kita berangkat melaksanakan kegiatan itu berangkat dari kebutuhan. Jadi saya setiap tahunnya melakukan atau pun mengusulkan kegiatan dan penganggaran tuh terlebih dahulu berkoordinasi ke UPT KEMENDIKBUT kita ada BGP kita ada BPMP dan kita juga ada eeeee Universitas gandeng seperti Universitas Syiah Kuala, jadi kita suka sharing dulu sebelum kita anggarin nih, bulan lima kemaren Proyeksi kedepan apa, oh arahnya misalnya tahun ini kita bicara Learning, kita

bicara coding, kita bicara AI. Jadi saya langsung mencoba mengalokasikan, baik saya kunci terus saya duduk lagi bersama kita punya MKKS (sekelompok kumpulan kepala sekolah SMP) kemudian kita punya K3S (sekelompok kerja kepala SD) jadi kita duduk ini yang di butuhkan tahun depan apa, kira-kira dari MKKS dan K3S kalian butuh lain tidak buat menunjang proses pembelajaran, oo bu kami sepakat, tapi dari guru penjas kami agak lemah, baik kita terima kita usulkan. Kami melakukan perencanaan penganggaran kegiatan tuh berdasarkan kebutuhan dan keinginan titipan-titipan pimpinan itu tidak bisa kita abaikan. Tapi, persentasenya tidak besar. pasti berkenaan langsung contoh tahun lalu, bu dari kami dari tahun lalu PT. MIFA butuh buat kegiatan, padahal kami tidak merasa butuh, tapi outcome nya juga positif baik kita masukan dan saya rasa peminan mana sih yang menginginkan hal yang burukan pasti tidak ada, tetap semua pimpinan mau hal yang positif” (Wawancara 24 Juni 2025).

Pelaksanaan (Realisasi)

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dara Amelia selaku Bidang Pembinaan dan Ketenagaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

“PA (kepada dinas) dan Kabag rencana setelah kami dari bidang menganggarkan, penganggaran yang sesuai pagu yang di tetapkan tim rencana itu menerima semua anggaran yang sudah kita usulkan PA dan rencana memonitoring. contoh beli ATK butuhnya lima belinya benar benar lima, jangan nanti butuhnya lima tapi yang di beli sebelas. Begitu juga SPPD tetap itu sesuai kebutuhan itu di kondisikan. Karna kita juga ada persentase kebutuhan (rasio)” (Wawancara 24 Juni 2025).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat Mendeskripsikan bahwa Strategi yang di Gunakan Dinas Pendidikan untuk Memastikan Anggaran digunakan Secara Efisien sebagai berikut : 1). Proses Penganggaran oleh Bidang Perencanaan, 2). Peran PA dan Kabag Perencanaan dalam verifikasi dan monitoring, 3). Pengawasan atas Kegiatan dan Pengeluaran, 4). Pentingnya pengelolaan internal untuk efisiensi.

Kurikulum Yang Seimbang dan Relevan

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dara Amelia selaku Bidang Pembinaan dan Ketenagaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

“Bicara kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan eee kami biasanya membuat pelatihan guru dan kebetulan dinas pendidikan telah berkolaborasi antara kampus ternama di Aceh ya itu kampus Syiah Kuala dengan adanya kolaborasi antar lembaga ini kami lebih mudah untuk mengirimkan guru-guru yang kurang mampu untuk menyampaikan materi kepada siswa maka dari itu adanya program seperti ini cara untuk meningkatkan mutu pendidikan semakin kompeten”(Wawancara 24 Juni 2025).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat Mendeskripsikan bahwa Kegiatan Efektif dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan sebagai berikut :

Dinas Pendidikan telah menjalin kolaborasi strategis dengan Universitas Syiah Kuala, salah satu perguruan tinggi terkenal di Aceh, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Barat. Untuk meningkatkan kompetensi guru, kerja sama ini sangat penting. Ini terutama berlaku untuk pendidik yang masih

menghadapi tantangan dalam menyampaikan materi pembelajaran secara efektif kepada siswa mereka. Program pelatihan guru yang terstruktur dan berbasis kebutuhan membekali guru dengan metode pembelajaran yang inovatif, teknik komunikasi yang efektif, dan penguasaan materi yang lebih mendalam. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan mengajar tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri guru dalam mengelola kelas dan membangun interaksi positif dengan peserta didik. Diharapkan dengan program ini, pendidikan di Aceh Barat akan menjadi lebih kompetitif dan mampu membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Efektifitas Penggunaan Anggaran

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dara Amelia selaku Bidang Pembinaan dan Ketenagaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

“Kalau bicara anggaran artinya kalau melihat efektivitas keberhasilan pelaksanaan anggaran yang realisasi di akhir tahun. Berapa persen realisasi serapan anggaran yang sudah di anggarkan yang terlaksana. Karna jujur saja ada beberapa bidang biasanya eee satuan unit kerja anggaran 10 miliar ga habis, karna keteteran waktunya ga sempat dilaksanakan. Itu juga menjadi tidak efektif dan tidak efisiensi dalam penganggarnya sehingga kenapa terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun” (Wawancara 24 Juni 2025).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat Mendeskripsikan bahwa Penilaian Dinas Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Capaian Mutu Pendidikan sebagai berikut :

Persentase realisasi serapan anggaran pada akhir tahun anggaran adalah salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran. Persentase ini tidak hanya menunjukkan seberapa besar anggaran yang telah digunakan, tetapi juga merupakan indikator penting dalam mengukur seberapa baik program kerja direncanakan dan dijalankan. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa satuan kerja masih gagal memanfaatkan anggaran. Sebagai contoh, dari total 10 miliar rupiah anggaran, masih ada bagian yang belum terserap hingga akhir tahun. Karena keterbatasan waktu pelaksanaan, beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak sempat dilakukan sesuai jadwal.

Inovasi dalam Pengelolaan Anggaran

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dara Amelia selaku Bidang Pembinaan dan Ketenagaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

“sebenarnya kalau anggaran untuk peningkatan yaa sudah ada tunjangan untuk guru, dan sertifikasinya lancar dan gajinya lancar itu mendukung untuk meningkatkan mutu pendidikan” (Wawancara 24 Juni 2025)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat Mendeskripsikan bahwa Inovasi dalam Pengelolaan Anggaran untuk mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan sebagai berikut :

Keberlanjutan dukungan anggaran yang tepat sasaran merupakan komponen penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Saat ini, pemerintah daerah telah

mengalokasikan anggaran khusus untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan berbagai tunjangan. Tunjangan kinerja, tunjangan profesi, dan insentif lainnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan pendidik. Selain itu, proses pencairan sertifikasi guru berjalan dengan lancar dan teratur. Ini memastikan bahwa guru mendapatkan haknya sesuai ketentuan tanpa hambatan.

Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan merupakan dua istilah yang berasal dari mutu dan pendidikan, artinya menunjuk pada kualitas produk yang di hasilkan lembaga pendidikan atau sekolah. Yaitu dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun yang lain,serta lulusan relevan dengan mempunyai tujuan (Aziz,A.2015) Untuk mengetahui Peningkatan Mutu Pendidikan , berikut contoh pertanyaan contoh yang mewakili setiap indikator yang di ajukan kepada Ibu Farmilawati selaku kepala manajemen guru pendidikan dan mutu kesiswaan di Cabang Dinas Pendidikan wilayah Aceh Barat sebagai berikut :
Kinerja Guru yang Baik

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Farmilawati selaku kepala Manajemen Guru, Tenaga Pendidik dan Mutu Kesiswaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

"Kalau kita berbicara tentang mutu pendidikan bisa dilihat dari Angka Partisipasi Siswa (APS) dan kendalanya ada di masyarakat kebiasaan atau habit. Kendala kedua adalah guru atau tenaga pendidik, menyatukan dan menyamakan persepsi manusia itu kan sulit. Terkadang ketika kita memaksakan capaian-capaian sebagai guru juga kerepotan dalam administrasi, sebagai guru di lapangan keribetan dan kesusahan dalam administrasi. Kendala ketiga tingkat kesejahteraan para guru juga mempengaruhi dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan juga guru-guru sertifikasi mempunyai pekerjaan jam mengajar yang wajib di penuhi dan sampai saat ini banyak guru yang gak penuh jamnya itu kan juga menjadi persoalan menjadi tidak bisa fokus untuk meningkatkan mutu pendidikan"(Wawancara 24 juni 2025).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat Mendeskripsikan bahwa Inovasi dalam Pengelolaan Anggaran untuk mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan sebagai berikut : Meskipun indikator ini tampak sederhana, ada banyak hambatan yang memengaruhi hasil dan kualitas pendidikan.ada, tiga kendala yang di temukan peneliti sebagai berikut : 1). Faktor masyarakat, 2). Guru dan Tenaga Pendidik, 3). Tingkat Kesejahteraan Guru.

Dukungan Pemerintah

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Farmilawati selaku kepala Manajemen Guru, Tenaga Pendidik dan Mutu Kesiswaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

"ya pasti, kembali kesejahteraan tadi. Kecuali kita berbicara penganggaran tadi hanya untuk pelaksanaan kegiatan. Tetapi berbicara kesejahteraan guru di dalamnya, ada berbicara penganggaran peserta didik, ada berbicara penyediaan sarana dan prasarana. Terlalu banyak anggaran yang di batasi juga berkhir pada tidak terwujudnya meningkatkan mutu pendidikan" (Wawancara 24 Juni 2025)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat Mendeskripsikan Apakah Keterbatasan Anggaran menjadi Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan sebagai berikut :

Penganggaran di sekolah mencakup banyak aspek yang lebih luas daripada hanya melakukan kegiatan. Ketika diskusi hanya membahas kegiatan, sering kali elemen penting lain terabaikan. Salah satunya adalah kesejahteraan guru, yang sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Jika guru memiliki kesejahteraan ekonomi dan sosial yang baik, mereka akan lebih termotivasi dan fokus untuk mengajar siswa mereka. Sebaliknya, jika kesejahteraan guru diabaikan, kualitas pendidikan juga akan menurun. Penganggaran juga harus mempertimbangkan kebutuhan siswa. Ini termasuk akses ke buku, alat tulis, laboratorium, dan teknologi pembelajaran. Jika siswa tidak memiliki fasilitas yang memadai, mereka akan kesulitan mengikuti proses belajar, ini jelas berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Budaya dan Iklim Organissasi yang Efektif

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Farmilawati selaku kepala Manajemen Guru, Tenaga Pendidik dan Mutu Kesiswaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

"Itu pertanyaan yang paling susah, kembali lagi ke kemanusia satu item yang paling tidak bisa kita paksakan. Kenapa sekarang ada cerita menuju indonesia emas 2045, kenapa 2045 kenapa ga sekarang, karna kita baru membentuknya tuh sekarang. Maka ketika berbicara pembangunan manusia itu panjang time line nya ga bisa kita ukur keberhasilannya sekarang. jadi berbicara tenaga pendidik di aceh barat di bawah dinas pendidikan kurang lebih 4.500 tenaga pendidik. Berbicara kecukupan tenaga pendidik itu lebih, yang kita butuhkan sesuai rasio hanya 3.000 tenaga pendidik. Yang berakibat tidak menjamin kualitas. Dari 4.500 tenaga pendidik bercampur umur ada yang muda dan ada yang tua. Dan menjadi masalah sebageian dari tenaga pendidik ini tidak mau update dalam pembelajaran seperti mengikuti jaman. Itu yang menjadi faktor juga untuk mendukung peningkagtan mutu pendidikan" (wawancara 24 Juni 2025)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat Mendeskripsikan Kondisi Sumber Daya manusia (Tenaga Pendidik dan Pendidik) dalam Mendukung peningkatan pada Mutu Pendidikan sebagai berikut : Pembentukan kualitas sumber daya manusia dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter merupakan proses jangka panjang yang tidak dapat diukur secara instan. Ini terkait dengan Visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan peningkatan kualitas pendidikan sebagai dasar. Karena perubahan kualitas manusia membutuhkan waktu dan perubahan yang berkelanjutan, apa yang dibangun saat ini baru akan terlihat hasilnya di masa mendatang. Data menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat memiliki kurang lebih 4.500 tenaga pendidik.

Pencatatan Administrasi Anggaran

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Farmilawati selaku kepala Manajemen Guru, Tenaga Pendidik dan Mutu Kesiswaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

"Pasti ada, contoh seperti penetapan anggaran pembacaan jubnis yang salah dalam penganggaran dana BOS. Contoh kita boleh menganggarkan pembayaran guru trus kita anggarin ternyata berbenturan dengan Pemkab Aceh Barat tidak boleh menganggarkan pembiayaan guru di luar dari gaji, akan berbenturan dengan BPK itu kan menghambat kinerja kita. Adanya tidak cocok di dalam aturan pemerintah dan mengakibatkan pada kinerja Dinas Pendidikan" (Wawancara 24 Juni 2025).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat Mendeskripsikan Kendala Teknis atau Administrasi dalam Pengelolaan Anggaran yang Berdampak pada Mutu Pendidikan sebagai berikut :

Penganggaran dana BOS seringkali terhambat oleh ketidaksesuaian anggaran dengan juknis atau peraturan yang berlaku. Sekolah, misalnya, dapat mengalokasikan dana untuk membayar guru untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Anggaran yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena kebijakan Pemkab Aceh Barat melarang pembiayaan guru di luar gaji pokok saat anggaran diajukan. Kondisi seperti ini tidak hanya menimbulkan kebingungan di tingkat pendidikan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah bagi BPK, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana negara. Karena itu, dana yang seharusnya mendukung kesejahteraan guru dan kegiatan pembelajaran tidak digunakan secara efektif. Akibatnya, program pendidikan menjadi terhambat. Selain itu, ada masalah koordinasi yang signifikan karena aturan pusat, aturan daerah, dan juknis yang berlaku di lapangan tidak sesuai satu sama lain. Dinas Pendidikan harus berusaha lebih keras untuk menyesuaikan anggaran agar sesuai dengan aturan sambil mempertahankan program pendidikan. Situasi ini memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas, yang berdampak pada kualitas pendidikan.

Solusi Permasalahan

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Farmilawati selaku kepala Manajemen Guru, Tenaga Pendidik dan Mutu Kesiswaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

"Strategi yang kita lakukan beberapa kali kami dan MKKS dan inspektorat tolong di berikan bahan jubnis yang sebenarnya bagaimana. Alhamdulillahnya ada angka temuan dari inspektorat, kesalahan administrasi itu mulai berkurang. Kalau sebelumnya karna kita tenaga pendidik bukan akuntan jadi kita tidak bisa membaca jurnal. Sedangkan kita tenaga pendidik di paksa untuk bisa menjadi bendahara atau pengelolaan keuangan, masalah besarnya adalah ketidak sesuaian penepatan kerja dan membuat administrasi jadi kendala" (Wawancara 24 Juni 2025).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat Mendeskripsikan Strategi Dinas Pendidikan Untuk Mengatasi Hambatan agar tidak Mengganggu Program Peningkatan Mutu Pendidikan sebagai berikut :

Dalam upaya untuk meningkatkan administrasi dan pengelolaan keuangan sekolah, kami telah membuat pendekatan yang kami rancang bersama MKKS dan inspektorat. Untuk membantu tenaga pendidik memahami prosedur yang benar dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, salah satu upaya yang dilakukan adalah meminta bahan juknis yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan. Alhamdulillah, hasil inspektorat mulai menurun berkat petunjuk yang jelas ini. Ini

menunjukkan bahwa kesalahan administrasi dapat perlahan dikurangi. Namun, masalah utama masih cukup besar. Banyak pendidik yang pada dasarnya ahli di bidang pendidikan tetapi tidak mahir akuntansi atau administrasi keuangan terpaksa mengambil tanggung jawab yang rumit seperti menjadi bendahara sekolah atau mengelola keuangan. Ketidaksesuaian antara keahlian dan penempatan kerja ini membuat guru lebih terbebani, membagi fokus mereka pada proses belajar mengajar. Akibatnya, kendala teknis dan kemungkinan kesalahan pencatatan masih ada, meskipun ada kemajuan dalam pengelolaan administrasi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran dan pelatihan yang tepat agar karyawan dapat memenuhi kewajiban administratif dan tetap fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.

SIMPULAN

Melalui serangkaian wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1). Hasil dari keseluruhan jawaban wawancara menunjukkan bahwa tahapan- tahapan untuk menyusun anggaran pendidikan sudah cukup akuntabilitas dan transparan dalam mengelola anggaran dan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pendidikan di dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. 2). Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terkait dengan Strategi Pengelolaan Pendidikan adalah dalam penyusunan pengelolaan anggaran pendidikan setiap bidang akan di prioritaskan program kerja dalam meningkatkan mutu pendidikan. 3). 3. Dari hasil wawancara ada beberapa temuan tentang peningkatan kualitas pendidikan, peneliti menemukan beberapa fenomena dalam peningkatan kualitas pendidikan, salah satunya adalah paradigma masyarakat yang percaya bahwa pendidikan tidak penting.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Yusrifal. 2018. "Etika Pemerintahan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap)". Skripsi Publishied. (Universitas Islam Negeri Alauddin Masassar).
- Azri, Azri, and Qaulan Raniyah. "Peran Teknologi Dan Pelatihan Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 3, no. 4 (2024): 4859-4884.
- Banjarnahor, S., & Daryanto, E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Pengelolaan Keuangan yang Efisien: Studi Kasus di TK Santa Lusía. *JOURNAL OF DIGITAL LEARNING AND DISTANCE EDUCATION*, 2(7), 596-601
- Fadhli, M. (2017). Manajemen peningkatan mutu pendidikan. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 215-240.
- Fathony, A. A., & Prianty, F. (2019). Pengaruh Anggaran Pendidikan Dan Penggunaan Anggaran Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Smp Negeri Se-Kecamatan Solokan Jeruk. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 10(1), 1-12
- Hidayah, N. (2022). Pandangan terhadap problematika rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 6593-6601.

-
- Komariyah, S., Nurhidayah, N., Andriyana, N., & Murtafi'ah, N. H. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan yang Efektif untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Al Wildan: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 78-86.
- Mesiono, M., & Haidir, H. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Hikmah*, 17(2), 61-73.
- Mulyana, Aji, and Mia Amalia. "Penerapan Hukum dalam Menangani Kasus Korupsi di Sekolah: Perspektif Sosiologi Tentang Dampak dan Solusi." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 65-84.
- Nurhidayah, A., Bremara, N. P., & Dewi, M. W. (2024). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2019-2022. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2).
- Puspita, D. G., & Andriani, D. E. (2021). Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama dan Permasalahannya. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(1), 21-37.
- Qasanah, U. K. (2023). Kebijakan Pengelolaan Anggaran dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP N 1 Sawoo (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA*, 6(1), 41-53.
- Sartini, S., Retno, A. C., Harsono, H., Haryanto, S., & Supriyoko, A. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berorientasi Pada Peningkatan Prestasi Peserta Didik. *PROFICIO*, 5(1), 764-770.
- Siswanto, D. H., & Fatimah, N. (2024). Pendekatan Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Atas Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan*, 21(2), 54-60.
- Tsofiawati, E. T., Pratiwi, M. R., & Ramayani, S. (2025). Analisis Kebutuhan Pelatihan Guru Dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan Di Era Society 4.0. *Jurnal Psikososial dan Pendidikan*, 1(2), 731-740.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D). Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.